

PERAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK PEMUDA (STUDI KASUS KNPI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG)

Sayid Muhammad Reza Pahlepi¹, Adam Idris², Santi Rende³

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

²Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Abstract: *The research findings show the role of KNPI as a means of political education through activities such as conducting board orientation, leadership regeneration, leadership training, conducting general election discussions, and cooperating with other organizational partners and the government. Forms of implementing political education include helping local governments and socializing politics, especially regarding crucial issues, Providing political education to youth and KNPI cadres, Samarinda Seberang District, Socialization of Simultaneous Regional Head Elections Obstacles faced in becoming a means of political education are obstacles in educating the political community and KNPI cadres in Samarinda Seberang District and obstacles in funding activities.*

Keywords : *role, education, politic, KNPI*

Abstrak: *Temuan penelitian menunjukkan peran KNPI sebagai sarana pendidikan politik melalui kegiatan seperti melakukan orientasi dewan, regenerasi kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan, melakukan diskusi pemilihan umum, dan bekerja sama dengan mitra organisasi lain dan pemerintah. Bentuk penerapan pendidikan politik termasuk membantu pemerintah daerah dan mensosialisasikan politik terutama mengenai isu-isu krusial, Memberikan pendidikan politik kepada kader pemuda dan KNPI, Kecamatan Samarinda Seberang, Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kendala yang dihadapi menjadi sarana pendidikan politik menjadi kendala dalam mengedukasi masyarakat politik dan kader-kader KNPI di kecamatan samarinda seberang dan kendala dalam kegiatan pendanaan.*

Kata Kunci : *Peran, Pendidikan, Politik, KNPI*

Pendahuluan

Alasan pendidikan politik itu penting untuk dilakukan adalah permasalahan akut yang terjadi mulai dari berakhirnya era orde baru dan memasuki masa reformasi dimana partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam dunia politik menampilkan tanda-tanda penurunan kualitas dan kuantitas dari sisi keaktifan/partisipasi politik. Dalam konteks pemilu dan pilkada, tingkat partisipasi warga tidak pernah sampai pada angka 80-90%. Hal ini membuktikan bahwa ada sebagian besar warga negara yang tidak tahu, apatis, maupun kecewa terhadap pelaksanaan pemilu maupun kecewa terhadap figur-figur yang tidak mampu membawa kesejahteraan bagi kehidupan mereka. Selain permasalahan golongan putih (golput) maupun apatisisme warga negara terhadap segala hal yang berbau politik, permasalahan lain yang cukup laten adalah permasalahan politik uang dalam proses pemilihan yang demokratis, dugaan jual beli jabatan hingga jual beli posisi calon kepala daerah oleh partai politik. Namun yang seringkali mencuat adalah permasalahan tingkat partisipasi dan permasalahan money politik. Tingginya tingkat golput maupun maraknya terjadi politik uang di masyarakat menunjukkan ada hal yang salah dalam pendidikan politik di negara kita. Partai politik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan politik yang baik malah menjadi sumber kegagalan pendidikan politik itu sendiri.

Kota Samarinda sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga mengalami permasalahan-permasalahan rendahnya partisipasi politik, tingkat antusiasme masyarakat dan pemuda yang rendah terhadap politik, kasus-kasus politik uang yang begitu santer terdengar setiap menjelang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, serta apatisme terhadap peristiwa-peristiwa politik di lingkungan mereka.

Kasus politik uang juga marak terjadi di Kota Samarinda saat menjelang pemilihan umum. Warga masyarakat banyak mendapat serangan fajar berupa amplop yang berisi uang dengan pecahan uang yang bervariasi antara Rp. 20.000, Rp. 50.000 hingga pecahan Rp. 100.000, biasa sehari sebelum hari pencoblosan. Politik uang juga dapat berupa pemberian barang seperti pemberian ambal ke rumah ibadah, fasilitas alat rebana dan jilbab untuk kelompok pengajian, hingga membangun fasilitas umum dimana di fasilitas umum tersebut dipasang ajakan untuk memilih calon tertentu.

Pendidikan politik sangatlah penting bagi warga maupun pemuda di Kota Samarinda, khususnya Kecamatan Samarinda Seberang, sehingga bisa berpartisipasi aktif dan memiliki tanggung jawab terhadap proses berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, pemuda dapat lebih memahami bagaimana proses politik berjalan dan bagaimana politik dapat menentukan pembagian kekuasaan dan dapat menjadi alat untuk dapat menegakkan aturan lingkungan. Semua itu bisa terwujud jika terdapat partisipasi politik yang aktif dari masyarakat. Salah satu diantara terjadinya proses pendidikan politik bagi warga dan pemuda adalah melalui wadah organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan di Indonesia jumlahnya tidak dapat dihitung oleh jari, jumlahnya kurang lebih ada 100 organisasi kepemudaan. Sebagai wadah pemersatu setiap organisasi kepemudaan di penjuru Indonesia, lahirlah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tanggal 23 Juli 1973 dengan maksud sebagai wadah nasional pemuda. Salah satu tujuan endirian KNPI adalah untuk mencipatkan rasa persatuan pemuda di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan peran tersebut pemuda tidak hanya berbekal semangat dan kerja keras, namun pemahaman mengenai politik itu sendiri harus dimiliki oleh setiap generasi muda di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti meyakini bahwa peran KNPI Kota Samarinda sebagai wadah organisasi kepemudaan di Kota Samarinda dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan muda. KNPI sebagai organisasi kepemudaan yang bertujuan meningkatkan potensi pemuda khususnya pemahaman politik, dalam mensosialisasikan politik agar mudah dipahami dan meningkatkan partisipasi pemuda untuk berpartisipasi aktif.

Kerangka Teori

Organisasi

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individual. Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain, minimal satu orang guna mencapai tujuan. Dua individu atau lebih yang memiliki tujuan yang sama bisa tergabung dalam satu wadah yang bisa disebut sebagai organisasi. Rivai dan Mulyadi (2009:169) menyatakan bahwa, “organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri”. dua orang atau lebih dalam satu unit yang terkoordinasi dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi. Keberadaan manusia merupakan faktor yang penting mengingat manusialah yang menjadi pendukung utama dari keberadaan organisasi seperti apapun bentuk organisasinya. Lebih lanjut, Rivai

dan Mulyadi (2009:170) menyatakan, “perilaku manusia berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku organisasi”.

Pusat dari organisasi itu adalah manusia berserta dengan perilakunya. Oleh karena itu, perilaku organisasi juga penting untuk dipahami. Rivai dan Mulyadi (2009:171) memberikan pengertian “perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu. Hal yang meliputi aspek yang ditimbulkan oleh pengaruh organisasi terhadap manusia demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi”.

Secara sistematis, studi perilaku organisasi akan membahas mengenai interaksi manusia yang didalamnya memuat perilaku, struktur serta proses dalam organisasi. Isu penting dalam konteks kajian perilaku organisasi adalah bagaimana hubungan antar manusia di dalamnya dan tujuan organisasi yang dibuat oleh manusia di dalamnya (Rivai dan Mulyadi, 2009:171).

Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif karena hal ini menyangkut dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Adanya perubahan sosial yang meliputi pengalokasian sumberdaya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan dimana administrasi pembangunan memiliki kepentingan dan terlibat didalamnya (Afifuddin, 2015).

Peran

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari adalah aktor dalam kategori sosial. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, tugas, harapan, norma dan perilaku seseorang atau kelompok dalam rangka mengelola dan memenuhi semua kegiatan. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa perilaku orang dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu adalah suatu konteks-spesifik, yang didasari pada posisi sosial dan faktor lainnya.

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan posisinya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial baik internal maupun eksternal dan tidak stabil. Selanjutnya, peran adalah kekuasaan, dan kekuasaan itu berfungsi baik secara organisasional maupun organik. Peran adalah kelengkapan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang karena memiliki status sosial tertentu yang di dalamnya terdapat dua jenis harapan, yaitu: pertama, harapan masyarakat pemilik peran atau kewajiban pemilik peran. Kedua, harapan pemegang peran terhadap masyarakat atau orang-orang yang terkait dengannya dalam menjalankan peran atau tugasnya.

Sudarhono (1998:15) mengatakan bahwa “peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku apa yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki posisi suatu jabatan”.

Soekanto (2009:212) mengatakan bahwa “peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”.

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang berstatus atau memiliki status. Selanjutnya, peran akan menjadi perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok status. Seseorang atau sekelompok orang memiliki status dan harus memenuhi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, peran dan status adalah dua aspek dari fenomena yang sama. Status

adalah seperangkat hak dan kewajiban, serta hak-hak yang diatur didalamnya.

Pendidikan Politik

Membahas mengenai pendidikan politik tidak terlepas dari demokrasi, dimana dalam bahasan ini terdapat tiga konsep utama, yaitu pendidikan, politik, dan demokrasi. Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi peserta didik untuk merespon positif lingkungannya dan untuk selalu melakukan perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang penting bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan (Handoyo & Lestari, 2017:5). Pendidikan politik dan demokrasi adalah proses interaksi antara pendidik (sekolah, partai dan pemerintah) untuk memastikan bahwa nilai dan norma politik dan demokrasi dipahami, dihayati dan diterapkan bagian yang dianggap baik dan ideal

Rusadi Kantaprawira (Kantaprawira, 2004: 55) menjelaskan bahwa pendidikan politik dan demokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politiknya. Seperti memahami demokrasi atau kedaulatan rakyat. Alfian (Alfian, 1990: 245-246) menggambarkan pendidikan politik dan demokrasi dalam arti luas sebagai bentuk kebijakan sosial. Pendidikan politik dan demokrasi dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sedemikian rupa sehingga mampu memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam politik dan demokrasi yang ideal, sehingga hasil dari pemahaman dan penghayatan tersebut, dapat dibangun guna menciptakan perilaku politik baru dan kehidupan demokrasi yang harmonis dalam mendukung sistem demokrasi yang ideal. Untuk memahami pendidikan politik, menurut Ramlan Surbakti (Surbakti, 1999), terlebih dahulu perlu dijelaskan sosialisasi politik. Surbakti menyatakan bahwa: Sosialisasi politik terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialektika antara siapa yang menyampaikan pesan dan siapa yang menerima pesan. Melalui proses ini, masyarakat mengenali dan mempelajari nilai, norma, dan simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Partisipasi Politik

Secara etimologis, kata partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* dan *capere*. *Pars* artinya “berbagi” dan *capere* artinya “berpartisipasi, ikut serta”, jadi artinya berpartisipasi atau berperan serta. Menurut Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2008: 367) secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berperan serta secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk melalui pemilihan kepala negara. . mempengaruhi langsung atau tidak langsung kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan seperti pemungutan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, membangun hubungan atau lobi dengan pejabat atau wakil, bergabung dengan partai atau salah satu gerakan sosial dengan aksi langsung, dll. Sementara itu, menurut H. Nie. dan Sidney Verba dalam Toni Adrianus Pito, Efriza dan Kemal Fasyah (2005:487) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas legal secara hukum yang sedikit banyak secara langsung mempengaruhi pemilihan pejabat atau tindakan yang mereka ambil. Setiap warga negara yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa kepentingannya diperhitungkan dalam pemilu atau paling tidak diurus oleh institusi politik yang ada.

Partisipasi politik dalam demokrasi dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan pelaksanaan demokrasi Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih penyelenggara negara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Contoh sederhana dari partisipasi ini antara lain pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara umum bentuk partisipasi dalam politik dan demokrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi konvensional dan nonkonvensional. Partisipasi konvensional dipahami sebagai bentuk partisipasi politik dan demokrasi yang dapat berkontribusi melalui pemungutan suara, partisipasi dalam diskusi politik, kegiatan kampanye, pendidikan dan kelompok kepentingan, serta komunikasi individu dengan pejabat dan administrasi. Partisipasi tidak konvensional, di sisi lain, dipahami sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan dengan tindakan seperti petisi, demonstrasi, pemogokan, konfrontasi dan lain-lain. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang konvensional dapat digambarkan sebagai bentuk-bentuk partisipasi yang normal dalam penyelenggaraan negara demokrasi modern. Bentuk partisipasi yang tidak konvensional, di sisi lain, adalah tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai legal atau ilegal.

Pemuda

Pemuda adalah pribadi yang sedang berkembang secara fisik dan mental emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia untuk pembangunan baik sekarang maupun di masa yang akan datang menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, yang belum memiliki kontrol emosi yang stabil. Kaum muda sedang mengalami masa perubahan sosial dan budaya.

Secara harfiah, menurut Kamus Websters, Princeton mengartikan bahwa "youth" yang diterjemahkan sebagai pemuda adalah "the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person". Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa remaja adalah individu dengan karakter dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, yang belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Kaum muda menghadapi masa perubahan sosial dan budaya.

Di sisi lain, menurut Taufik Abdullah (1974:6), remaja adalah individu dengan karakter dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, yang belum memiliki kontrol emosi yang stabil. Menurut Mukhlis (2007: 1), anak muda sekarang adalah generasi yang pundaknya dibebani dengan harapan lain, terutama generasi lain. Hal ini dapat dimaklumi, karena generasi muda diharapkan menjadi generasi penerus, generasi yang harus melengkapi dan menjalankan tongkat untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut Taufik Abdullah (Abdullah, 1974:38) Ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi.

Dalam kesempatan ini, maka penulis ingin mencoba untuk mengembangkan konsep dalam memaknai arti pemuda melalui beberapa pengertian diatas. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi pemuda terbagi menjadi dua pengertian, yakni pemuda berdasarkan usia dan pemuda berdasarkan karakternya. Dengan demikian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa yang berada dalam transisi perkembangan antara umur 15 sampai 30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda perkembangan dari remaja menuju dewasa, dengan karakteristik yang dinamis,

bergejolak, namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan bagi pemuda untuk mewujudkan pemuda yang berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tanpa upaya-upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, maka bentuk pemuda yang dilahirkan akan bersifat pasif, atau pemuda itu tidak bersifat aktif seperti yang diharapkan.

Komite Nasional Pemuda Indonesia

Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI terbentuk pada 23 Juli 1973 sebagai wadah atau tempat bersatunya seluruh pemuda Indonesia sekaligus wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan di Indonesia yang juga secara antropologis memiliki fungsi untuk menjadi sumber utama dalam sistem kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan bangsa di semua tingkatan baik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional (KNPI.id).

Berhimpunnya organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP dalam KNPI dilandasi oleh kesamaan nilai-nilai dasar kenegaraan Indonesia yakni ideologi pancasila yang sekaligus berfungsi sebagai perekat sosial dengan tekad persatuan dan kesatuan yang berwawasan kebangsaan, idealisme, solidaritas antar pemuda, cinta tanah air serta mengabdikan kepada kepentingan nasional yang lebih luas. Dengan konteks tersebut, KNPI memiliki tanggung jawab sebagai wadah berhimpun atau berkumpulnya semua kaum muda bangsa yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan pembinaan pemuda secara generatif serta kepentingan nasional Indonesia sebagai pusat orientasi dari segala aktivitas organisasi yang dilakukan. KNPI disepakati sebagai jawaban bagi permasalahan bangsa untuk mengerjakan hal-hal yang berdimensi lintas OKP, lintas sektoral dan mampu mengatasi kepentingan golongan dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kontribusi demikian, maka eksistensi KNPI akan berdaya guna sebagai satu-satunya wadah berhimpun terbaik bagi pemuda harapan bangsa.

Kerangka Berpikir

Kerangka Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai topik penting. Kerangka yang baik secara teoritis menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Maka secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika terdapat variabel moderasi dan variabel intervening dalam penelitian, maka harus dijelaskan pula mengapa variabel-variabel tersebut dimasukkan dalam penelitian. Hubungan antar variabel tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pemikiran.

Dalam penelitian ini, penjelasan alur berpikir penelitian adalah peran KNPI Kec. Samarinda Seberang sebagai sarana pendidikan politik merupakan suatu bentuk peran aktif dan peran partisipatif dan tanggungjawab pemuda dalam bentuk organisasi kepemudaan sebagai respon kondisi rendahnya kesadaran politik pemuda, khususnya pemuda untuk turut serta dalam peristiwa demokrasi pemilihan wakil rakyat maupun kepala daerah. Peran sebagai sarana pendidikan politik juga dilakukan untuk merespon apatisme pemuda terhadap politik. Peran dan tanggungjawab pemuda, termasuk didalamnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang

Kepemudaan. Dalam melaksanakan perannya, peran KNPI Kota Samarinda merupakan bentuk peran sebagai strategi dan peran sebagai alat komunikasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2000:31)

Peran KNPI Kec. Samarinda Seberang sebagai sarana pendidikan politik sendiri akan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda, bahkan bisa mendorong pemuda untuk turut serta menjadi pelaku politik yang akan dipilih oleh warga. Partisipasi politik yang baik merupakan suatu keharusan dalam proses menuju negara yang demokratis. Pemuda yang terdidik dan mampu berpikir kritis terhadap situasi politik menjadi modal penting untuk kemajuan daerah hingga ke level nasional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Zuriyah (2009:47) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gejala, fakta, atau peristiwa yang sistematis dan ringkas yang berkaitan dengan ciri-ciri populasi atau wilayah tertentu. Dalam penelitian deskriptif, tidak perlu mencari atau menjelaskan konteks dan menguji hipotesis.

Sugiyono (2011:12-13) lebih lanjut mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (natural environment). Objek alam adalah objek yang berkembang apa adanya, peneliti tidak memanipulasinya dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data rinci yang mengandung makna. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, melainkan lebih menekankan pada kepentingan.

Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus. Ditemukan bahwa penerapan metode penelitian ini mampu mengkaji fenomena kekinian dalam konteks nyata, dilakukan di mana tidak ada batasan yang jelas antara fenomena dan konteks, dengan sumber data yang berbeda (Neuman, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Peran KNPI Kecamatan Samarinda Seberang dalam Pendidikan Politik

Permasalahan politik di Indonesia khususnya di Kota Samarinda seringkali mengalami pasang surut. Partisipasi warga dalam peristiwa politik pasca reformasi menunjukkan tanda-tanda inersia, yang tercermin dari menurunnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik. Misalnya, dalam pemilihan parlemen. Di beberapa wilayah Kota Samarinda, masalah masih tetap ada dengan masih tingginya proporsi golongan kulit putih (Golput) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja parpol dan tokoh yang ditawarkan. Pelaksanaan partisipasi politik masih terancam oleh pengaruh politik uang dalam proses seleksi. Untuk mengatasi semua masalah ini, pemerintah harus mengurangi angka non-partisipasi dan menjatuhkan sanksi berat pada pelaku politik uang sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan para pemimpinnya. Namun, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mengurangi dampak tersebut. Pihak lain harus dilibatkan untuk membantu pemerintah menanamkan pengetahuan kebijakan pada warganya.

KNPI Kecamatan Samarinda Seberang, sebagai salah satu OKP yang berada di bawah KNPI Kota Samarinda, merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam pendidikan politik khususnya bagi pemuda dan masyarakat di Kecamatan

Samarinda Seberang. Pendidikan politik itu sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politiknya dalam pengertian tentang kedaulatan rakyat atau demokrasi, yang harus dimainkan oleh rakyat secara partisipatif.

Pentingnya pendidikan politik didasarkan pada pentingnya pendidikan politik itu sendiri, baik dari segi filosofi, tujuan, relevansinya dengan sistem pendidikan nasional, maupun dari segi sifat pengembangan generasi muda. Secara filosofis, pendidikan politik memiliki nilai penting karena menyimpang dari rasa kesamaan dan keutuhan konsep dan motivasi tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian ini, pendidikan politik merupakan upaya untuk menanamkan, menumbuhkan dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial dan kebangsaan.

Dalam melakukan pendidikan politik, KNPI Kecamatan Samarinda Seberang melaksanakannya dalam bentuk orientasi pengurus, kaderisasi kepemimpinan, latihan kepemimpinan, melakukan sosialisasi, melaksanakan diskusi pemilu dan melaksanakan kerjasama dengan mitra organisasi pemuda lainnya maupun dengan organisasi eksternal serta pemerintah. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Orientasi Pengurus
- b. Kaderisasi Kepemimpinan
- c. Latihan Kepemimpinan
- d. Melaksanakan Diskusi Pemilu
- e. Melaksanakan Kerjasama dengan Mitra atau Organisasi lain

Bentuk Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh KNPI Kecamatan Samarinda Seberang

Dalam merealisasikan amanat DPD KNPI Kota Samarinda, KNPI Kecamatan Samarinda Seberang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemuda, khususnya anggotanya, dalam kurun waktu sebulan atau dua bulan sekali dilakukan pembahasan isu-isu kekinian yang terjadi di Indonesia secara umum, Kota Samarinda secara khusus. Hal ini dinilai menjadi modal penting, karena setelah mengikuti diskusi diharapkan mereka semakin semangat membangun bangsa dengan mengikuti setiap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemuda, KNPI Kecamatan Samarinda Seberang menyelenggarakan seminar bertajuk politik dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang politik dan pemerintahan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemuda, anggota KNPI Kecamatan Samarinda Seberang juga sering menjadi pembicara dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelajar atau pemuda di Kota Bandung.

Selanjutnya DPD KNPI Kota Bandung juga sering melakukan kegiatan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan instansi pemerintah di Kota Samarinda khususnya kegiatan yang berkaitan dengan hari-hari penting di Indonesia seperti, Hari Kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Kebangkitan Nasional yang dirancang dengan berbagai kegiatan yang menarik perhatian masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat khususnya para pemuda kembali mengingat jati diri sebagai makhluk sosial, mengingat tugas pemuda sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan bangsa.

Dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, terutama pemuda dalam lingkup Kecamatan Samarinda Seberang, KNPI Kecamatan Samarinda

Seberang melakukan pendidikan politik dalam bentuk-bentuk yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah daerah dan mensosialisasikan politik khususnya mengenai isu-isu krusial
- b. Memberikan edukasi politik terhadap pemuda dan kader KNPI Kecamatan Samarinda Seberang
- c. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Hambatan KNPI Kecamatan Samarinda Seberang Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Dalam posisi sebagai sarana pendidikan politik bagi pemuda, KNPI Kecamatan samarinda seberang mengalami beberapa kendala. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Kendala dalam edukasi politik masyarakat dan kader KNPI Kecamatan Samarinda Seberang

Pelaksanaan pendidikan politik yang bertujuan untuk mengembangkan kader yang memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat mandiri di segala bidang, akan menemui kendala yang perlu dibenahi. Kendala utama bagi KNPI di Kecamatan Samarinda Seberang adalah masalah klasik kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan politik sebagai bagian penting dari upaya integritas NKRI. Kartono (2005:72-73) mengemukakan bahwa kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pendidikan politik adalah sebagai berikut: a) Sangat sulit membuat orang yang masih dalam kemiskinan dan yang tergolong miskin untuk menyadari keadaannya sendiri. Sulit untuk membawa mereka ke tingkat kepercayaan diri yang mengungkapkan semua masalah yang mereka alami; b) Apatisme politik dan sinisme politik dengan kecenderungan sikap putus asa membuat masyarakat sulit mempercayai upaya pendidikan dan gerakan politik yang dianggap salah; c) Dengan tingkat pendidikan yang rendah atau minimnya pendidikan, sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan memahami kompleksitas situasi sosial dan politik di sekitarnya.

- b. Kendala Dalam Pendanaan Kegiatan

Keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala bagi organisasi untuk melaksanakan program kerja. Kendala tersebut dapat mengakibatkan pelaksanaan program kerja atau perannya terhambat. Menurut Ketua KNPI Samarinda Seberang dalam wawancaranya, dana yang tersedia terbatas, terutama untuk pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan Program Kerja KNPI Kecamatan Samarinda Seberang. Seperti yang kita ketahui dalam organisasi, KNPI Kecamatan Samarinda Seberang hanya dibiayai dari iuran. Selain mengajukan proposal anggaran pada pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala bagi KNPI Kecamatan Samarinda Seberang dalam pelaksanaan program kerja tersebut. Selain itu, masih minimnya sarana dan prasarana yang ada. Kadang-kadang, ketika sebagian besar anggotanya adalah anak-anak muda yang melakukan kegiatan lain, mereka hanya mengadakan pertemuan atau diskusi di sekretariat atau di salah satu rumah anggota.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, KNPI Kecamatan Samarinda Seberang merupakan salah satu wadah komunikasi dan pergaulan bagi generasi muda khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang. KNPI Samarinda Seberang

merupakan wadah pemantapan dan penyemangat generasi muda, yang juga bertanggung jawab dalam proses regenerasi bangsa.

KNPI Kecamatan Samarinda Seberang memiliki satu tujuan yaitu menjembatani berbagai perbedaan dalam tubuh generasi muda yang muncul dari latar belakang yang berbeda, untuk menyatukan seluruh potensi pemuda, untuk memajukan persatuan dan kesatuan untuk berkreasi. kerjasama yang seimbang antar pemuda. Generasi untuk menumbuhkan dan memimpin generasi muda menuju pembangunan nasional dan menyiapkan kerangka nasional bagi para pemimpin nasional yang mampu menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.

Peran KNPI sebagai organisasi kepemudaan terutama diwujudkan dalam tujuan dan fungsi organisasi. KNPI bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia dalam rangka mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menciptakan generasi muda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia, dan profesional untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional; dan penguatan seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, kaya, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sebagai wadah perjuangan pemuda Indonesia.

Mencermati pernyataan di atas, KNPI harus melakukan upaya untuk mencapai tujuannya seperti: Pelatihan pemimpin dan pengembangan karakter, pelatihan keterampilan dasar kepemimpinan dan pelatihan bisnis untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, kaya dan makmur. Selain itu, KNPI harus berperan sesuai dengan fungsinya, seperti misalnya. memastikan pemberdayaan pemuda yang adil dalam pembangunan pemuda di daerah, memberikan pelatihan politik dan kepemimpinan dan kepemimpinan kepada pemuda untuk bernegosiasi dan mengatasi masalah nasional.

KNPI merupakan sarana pembinaan kerohanian, pendidikan dan pembinaan generasi muda yang berakhlak mulia untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam teori peran Soekanto (Soekanto, 2012) peran hanya dilihat dari satu orang, namun dalam penelitian ini, dilihat dari satu organisasi yaitu KNPI Kecamatan Samarinda Seberang. Kedudukan atau Status KNPI di Kecamatan Samarinda Seberang merupakan wadah berbagai organisasi pemuda di Kecamatan Samarinda Seberang untuk pemuda dan masyarakat di Samarinda Seberang.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Peran sebagai sarana pendidikan politik oleh KNPI Kecamatan Samarinda Seberang sudah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun menghadapi beberapa hambatan dalam perjalanannya. Peran itu dilihat dari tiga perspektif yaitu peran sebagai wadah, peran sebagai penggerak motivator, dan peran yang bersifat preventif. Hal ini yang kemudian membedakan hasil temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani (2016) yang lebih melihat peran tokoh partai politik dalam pendidikan politiknya sehingga tidak membahas lebih detil peran secara organisasional sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini. Artinya penelitian ini menggambarkan secara lebih sedikit komprehensif terkait peran organisasi dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Temuan penelitian Handayani juga tidak menjelaskan prospek keberlanjutan dari peranan yang dilakukan oleh tokoh partai politik dalam memberikan pendidikan politik. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan politik yang diberikan bersifat situasional. Hal ini berbeda dengan temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun mengalami beberapa hambatan, tetapi pendidikan politik tetap menjadi salah satu

program dari KNPI Kecamatan Samarinda Seberang sebagai organisasi kepemudaan.

Temuan penelitian yang terkait dengan KNPI Kecamatan Samarinda Seberang sebagai organisasi dalam peranan sebagai sarana pendidikan politik juga berbeda dengan temuan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadi (2016) dimana dalam hasil temuannya menjelaskan posisi elit politik lokal di Kabupaten Lombok dalam memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa diselenggarakan melalui lembaga-lembaga yang memiliki peran langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu. Bukan hanya pada partai politik saja, tetapi pendidikan politik mahasiswa menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Ada mobilisasi dan kepentingan elit politik dalam melakukan pendidikan politiknya. Hal yang sama juga terlihat pada penelitian lain yang dilakukan oleh Pasaribu (2017) dimana dalam hasil temuan penelitiannya memperlihatkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik lebih banyak mengarah pada kepentingan partai politik untuk menggaet massa sebanyak-banyaknya. Hal ini cukup berbeda jauh dengan temuan pada penelitian ini yang memperlihatkan bahwa ada peranan organisasi kepemudaan yang kemudian menjadi sarana pendidikan politik meskipun bukan dalam konteks pemilu saja. Temuan pada penelitian ini lebih menekankan posisi KNPI Kecamatan Samarinda Seberang sebagai sarana pendidikan politik adalah peran sebagai wadah, peran sebagai penggerak motivator, dan peran yang bersifat preventif.

KNPI Kecamatan Samarinda Seberang menyadari bahwa pendidikan politik merupakan cara mempersiapkan organisasi untuk memenangkan pertarungan kekuasaan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan politik KNPI di Kecamatan Samarinda Seberang juga merupakan sarana melatih personel yang dapat mengambil alih kekuasaan di pemerintahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan saat ini bahwa perubahan dan perbaikan yang masif memerlukan sistem yang kuat yang membutuhkan pengembangan pedoman yang mendukung visi dan misi KNPI Kecamatan Samarinda Seberang yang sejalan dengan Indonesia.

Kesadaran yang tinggi dari warga negara tentang hak dan kewajibannya merupakan salah satu indikator terbentuknya masyarakat madani Indonesia. KNPI Samarinda Seberang mengakui bahwa, dari perspektif politik sehari-hari, pendidikan politik merupakan upaya untuk menciptakan suasana bagi masyarakat sipil Indonesia. KNPI Kecamatan Samarinda Seberang meyakini jika perilaku masyarakat Indonesia dilandasi Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, maka masyarakat madani Indonesia dapat terwujud. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat penting untuk memungkinkan para kader menjalankan hak dan tanggung jawabnya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KNPI Kecamatan Samarinda Seberang dalam melakukan pendidikan politik kepada pemuda dan masyarakat Kecamatan Samarinda Seberang dalam bentuk melakukan orientasi pengurus, kaderisasi kepemimpinan, latihan kepemimpinan, melaksanakan diskusi pemilu, dan melakukan kerjasama dengan mitra organisasi dan pemerintah. Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KNPI Kecamatan Samarinda Seberang sudah melakukan peran sebagai sarana pendidikan politik dengan baik meskipun dalam beberapa hal belum optimal karena masalah pendanaan kegiatan.

2. Peran KNPI Kecamatan Samarinda Seberang dilihat dari tiga perspektif yaitu peran sebagai wadah, peran sebagai penggerak motivator, dan peran yang bersifat preventif. Peran KNPI Kecamatan Samarinda Seberang sebagai wadah pendidikan politik dilaksanakan melalui bidang-bidang kegiatan dan aksi pemuda dalam KNPI Kecamatan Samarinda Seberang. Peran KNPI Kecamatan Samarinda Seberang sebagai motivator yaitu membentuk kepribadian politik pemuda melalui sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menanamkan kesadaran politik pemuda dalam menghayati hak dan kewajibannya serta kepedulian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, dan meningkatkan partisipasi politik pemuda terhadap kegiatan politik baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran KNPI Kecamatan Samarinda Seberang yang bersifat preventif ini dilaksanakan melalui kegiatan aksi pemuda bersama masyarakat. Bentuk pendidikan politik dilakukan dalam bentuk Membantu pemerintah daerah dan mensosialisasikan politik khususnya mengenai isu-isu krusial, Memberikan edukasi politik terhadap pemuda dan kader KNPI Kecamatan Samarinda Seberang, Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
3. Hambatan yang dihadapi dalam menjadi sarana pendidikan politik adalah Kendala dalam edukasi politik masyarakat dan kader KNPI Kecamatan Samarinda Seberang serta kendala dalam pendanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian pada hasil temuan penelitian, pembahasan serta kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut

1. Terkait dengan temuan penelitian yang menemukan masih adanya pemuda atau masyarakat yang apatis terhadap politik atau sama sekali tidak tahu politik, KNPI Kecamatan Samarinda Seberang dapat atau hendaknya menggunakan pendekatan persuasif pada pemuda dan masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari pendidikan politik ini dapat tersampaikan dengan baik. Pendekatan persuasif bisa dilakukan ajakan atau keikutsertaan pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KNPI Kecamatan Samarinda Seberang.
2. Pada temuan penelitian yang terkait kendala pendanaan kegiatan, KNPI Kecamatan Samarinda Seberang harusnya melakukan koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintahan yang terkait dengan organisasi pemuda seperti Kesbangpol maupun Dispora Kota dan Provinsi. Selain itu, KNPI Kecamatan Samarinda Seberang juga dapat berkolaborasi dengan KPU serta Bawaslu baik di tingkat kota dan provinsi dalam hal mengadakan kegiatan yang terkait dengan edukasi dan pendidikan politik bagi masyarakat

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. 1974. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Alfian. 1990. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Aspinall, Edwar. 2015. *Politik Uang Di Indonesia 'Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014'*. Yogyakarta: POLGOV.
- BPS Kota Samarinda. 2020. *Kecamatan Samarinda Seberang Dalam Angka 2020*. BPS Kota Samarinda.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hall, D. T. 2002. *Careers in and out of the organization*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Handoyo, E., & Lestari, P. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Kantaprawira, R. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, K. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali Press.
- Kuntowijoyo. 1994. *Demokrasi & Budaya Birokrasi*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Mas'oed, M., & Andrews, C. Mac. 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miles, M. B., Huberman, M. A. and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Washington DC: SAGE.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi 7). Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
- Pito, T. A., Efriza, & Fasyah, K. 2005. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Jakarta: Nuansa Cendekia.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. 2015. *Organizational Behavior* (16th Edition). Pearson Education Inc.
- Sobirin, A. 2018. *Budaya Organisasi: Pengertian, Makna dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi*. STIM YKPN.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
- _____. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarhono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Deviasi, dan Implikasinya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Kesatu. Alfabeta: Bandung.
- Sumantri. 2003. *Fungsi Media Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Surbakti, R. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Warastuti. 2006. *Peran Lembaga Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan*. Solo: UNS Press.
- Winataputra, U. S. 2001. *Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. UPI Bandung.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi*. Cetakan Ketiga. Bumi Aksara: Jakarta.